



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Menag: Jamaah Umrah Berangkat Desember
Tanggal	: Rabu, 01 Desember 2021
Surat Kabar	: Republika
Halaman	: 1-7

Menag: Jamaah Umrah Berangkat Desember

■ ZAHROTUL OKTAVIANI,
FEBRIANTO ADI SAPUTRO

JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, berdasarkan data Sistem Komputerisasi Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatu) Kementerian Agama, ada 59.757 jamaah yang keberangkatannya tunda karena pandemi Covid-19. Dari data tersebut, 18.752 jamaah di antaranya telah memiliki visa dan siap berangkat pada Desember nanti.

"Dari jumlah tersebut, ter-

dapat 18.752 orang yang telah memiliki visa dan siap untuk diberangkatkan. Jamaah yang

tertunda keberangkatannya ini menjadi prioritas diberangkatkan pada tahap awal dibukanya penyelenggaraan umrah pada Desember nanti," ujarnya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII DPR, Selasa (30/11).

Menteri Agama menuturkan, ia telah bertemu dengan menteri

haji dan umrah Saudi, gubernur Makkah, serta menteri urusan Islam, dakwah, dan penuluhan

Arab Saudi, pekan lalu. Pertemuan itu terjadi dalam rangkaian kunjungan kerja atas undangan menteri urusan Islam Saudi.

Kerajaan Arab Saudi disebut telah memberikan izin perjalanan langsung kepada enam negara, yaitu Indonesia, Pakistan, Vietnam, Brasil, Mesir, dan India. Berdasarkan

keputusan pembukaan pintu perjalanan ibadah umrah juga otomatis dibuka dengan beberapa ketentuan.

Ketentuan pertama, jamaah umrah yang datang dari luar negeri dengan menggunakan visa umrah dan sudah disuntik vaksin lengkap dengan vaksin yang digunakan Saudi boleh langsung melaksanakan umrah dan tidak perlu melakukan karantina.

"Bagi jamaah yang telah

BERITA TERKAIT

Sosialisasi Umrah Masa Pandemi Dipertukar

Hlm-7

Menag: Jamaah Umrah Berangkat Desember .. dari hlm 1

divaksin lengkap dengan vaksin yang diajukan WHO, diberlakukan karantina tiga hari. Setelah 48 jam karantina, dilakukan tes PCR. Jika dinyatakan negatif, langsung dibolehkan melaksanakan umrah," kata Menag.

Mengenai skenario penyelenggaraan ibadah umrah, Menag menyebut ada beberapa hal yang telah dipersiapkan, mulai dari sebelum keberangkatan, saat di Arab Saudi, hingga saat kedatangan kembali di Indonesia. Salah satunya, jamaah wajib melakukan karantina selama tiga hari, dimulai sejak saat tiba di kerajaan.

Selama masa karantina itu, jamaah dilarang keluar dari kamarnya. Adapun pelaksanaan umrah dilakukan selama sembilan hari, sudah termasuk perjalanan pulang-pergi. "Akomodasi disisi dua orang setiap kamar, makan disajikan dalam kemasan, dan transportasi mengikuti ketentuan Arab Saudi," ucap Yaqut.

Pelaksanaan umrah, lanjut Menag, dilakukan satu kali saja. Ibadah shalat lima waktu di Masjidil Haram dilakukan dengan menggunakan aplikasi Eatmarna. Selain itu, jamaah bebas melakukan shalat lima waktu di Masjid Nabawi.

Sebelum kepulangan ke Indonesia, jamaah wajib melakukan tes PCR. Hanya yang hasil tesnya negatif yang ditizinkan kembali ke Tanah Air. Jamaah juga harus melakukan tes PCR setelah sampai di Indonesia. Mereka kemudian wajib menjalankan karantina di hotel yang dipilih PPIU yang sudah divalidasi, sesuai ketentuan Satgas Covid-19.

Menag juga menyatakan, jamaah umrah kali ini berjalan lancar, ada kemungkinan besar pintu haji bagi Indonesia terbuka lebar. Artinya, jika tidak ada lagi kasus-kasus seperti yang pernah terjadi dahulu, seperti hasil PCR bocor, kesempatan untuk ber-

Kami belum bisa menetapkan berapa kuota awal karena secara efektif baru bekerja kemarin sejak kembali dari Saudi," kata dia.

Dalam perincian umum data yang dipegang Kemenag, pemerintah visa berusaha kurang dari 18 tahun ada sebanyak 889 orang. Di sisi lain, jamaah dengan usia di atas 65 tahun mencapai 2.549 orang. "Berdasarkan range batasan usia ini, ada 15.314 orang. Makanya kalau skemanya mengikuti batas usia ini, 15 ribu jamaah akan disaring kembali," lanjut Menag.

Persiapan haji

Menag mengatakan, jika umrah kali ini berjalan lancar, ada kemungkinan besar pintu haji bagi Indonesia terbuka lebar. Artinya, jika tidak ada lagi kasus-kasus seperti yang pernah terjadi dahulu, seperti hasil PCR

haji sudah ada di depan mata.

Terkait dengan skema satu pintu atau *one gate policy* (OGP), Yaqut menyebut Indonesia akan melakukannya karena masih belum bisa memberangkatkan jamaah secara besar-besaran. Apalagi, simulasi ini menjadi bagian dari upaya meyakinkan Saudi, karena itu jamaah harus dipilih dan umrah dilaksanakan sesuai dengan kesepian yang ada.

"Saya sudah sampaikan kepada dirjen PHU agar skema umrah ini *as soon as possible*, segera diberangkatkan, agar bisa menunjukkan bahwa Indonesia siap menyelenggarakan umrah dan haji," kata dia.

Dalam rapat kemarin, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta pemerintah memastikan kesiapan jamaah umrah yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci. "Mohon kiranya

untuk benar-benar dipastikan bahwa jamaah umrah yang akan berangkat merupakan orang-orang yang siap," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, mereka tidak hanya sekadar jamaah umrah, tetapi juga duta bangsa. Para jamaah akan memegang tanggung jawab besar untuk menjaga kehormatan bangsa. "Karena sekali kita lahir, sekali kita bermasalah, maka kemungkinan untuk di-banned atau ditutup kembali," ujarnya.

Yandri juga meminta penetapan biaya referensi untuk biaya umrah pada masa pandemi perlu segera direvisi. Menurut dia, Kemenag perlu segera mengkaji ulang biaya tersebut untuk mengetahui besarnya tetap sama atau mengalami perubahan.

■ ed: firinza zanzani